

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 28 Agustus 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 1)	Rabu, 28 Agustus 2019	Perkuat Keandalan Listrik	Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kaltim perlu didukung dengan suplai listrik yang mumpuni guna mewujudkan konsep kota ramah lingkungan dan sistem transportasi yang andal.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 2)	Rabu, 28 Agustus 2019	Keberlanjutan di Ibukota Baru	Pemerintah baru saja mengumumkan akan memindahkan ibukota negara ke Kaltim. Keputusan ini disambut gembira, termasuk para pengusaha.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 28 Agustus 2019	Partisipasi Badan Usaha Tetap Dibuka	Partisipasi usaha dalam penyelenggaraan SPAM berpeluang terus berlanjut. RUU SDA bakal membuka keran kerjasama antara badan usaha dengan pemegang izin.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Rabu, 28 Agustus 2019	Pengembang Mulai Terancam	Pengembang perumahan bersubsidi mulai merasa terancam dengan belum juga ditambahnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, padahal sudah hampir tidak ada lagi pembiayaan tersebut.
5	Kompas (Halaman 1)	Rabu, 28 Agustus 2019	Perumahan Rakyat: Rusun Menjawab Keterbatasan Lahan	Penyediaan hunian yang layak bagi rakyat terbentur harga lahan yang terus meningkat. Keterbatasan lahan diatasi dengan lokasi perumahan rakyat yang terintegrasi penataan kota dan transportasi massal.
6	Kompas (Halaman 1)	Rabu, 28 Agustus 2019	Menuju Kota Bisnis dan Niaga Global	Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah berkomitmen terus menjadikan Jakarta sebagai prioritas pembangunan serta mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan yang berskala regional dan global.
7	Kompas (Halaman 1)	Rabu, 28 Agustus 2019	Perkuat Kajian Sosial dan Lingkungan	Kajian sosial dan lingkungan di lokasi calon ibukota negara di Kaltim perlu diperkuat. Rancangan dasar hukum pemindahan juga mendesak segera disusun.
8	Kompas (Halaman 13)	Rabu, 28 Agustus 2019	Amankan Kebutuhan Lahan	Harga lahan yang terus meningkat adalah permasalahan yang dialami pemerintah, termasuk dalam menyediakan perumahan rakyat.
9	Kompas (Halaman 2)	Rabu, 28 Agustus 2019	Rumah Tapak Tak Dibangun	Saat ibukota negara pindah ke kaltim pada 2024, aka nada sekitar 1,5 juta orang pindah, mulai dari pejabat beserta keluarga dan tenaga jasa pendukungnya.
10	Kompas (Halaman Jendela D)	Rabu, 28 Agustus 2019	Menjawab Kritik Pemindahan Ibukota	Sejumlah kritik bermunculan seiring dengan pengumuman lokasi baru ibukota Indonesia. Pemerintah pun sigap menjawab berbagai kritik terkait pemindahan ibukota tersebut.
11	Kompas (Halaman 18)	Rabu, 28 Agustus 2019	Kembangkan Jakarta Smart City, DKI Gandeng Usaha Rintisan	Konsep smart city di Jakarta berubah orientasi, dari awalnya memprioritaskan aplikasi pengaduan, kini tengah dikembangkan untuk mencakup seluruh aspek kehidupan warga melalui kolaborasi dengan pihak di luar pemerintahan.
12	Kompas (Halaman 15)	Rabu, 28 Agustus 2019	Kaltim Siapkan Akses Dasar	Pemindahan ibukota negara ke kaltim mulai disiapkan. Untuk tahap awal, yang akan digarap adalah akses dasar berupa infrastruktur dan persiapan daya dukung air bersih dan listrik.

13	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 3)	Rabu, 28 Agustus 2019	Sektor Jasa Jadi Motor Pertumbuhan Ibukota	Bappenas menargetkan pemindahan ibukota bisa menumbuhkan berbagai sektor ekonomi di Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur.
14	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 4)	Rabu, 28 Agustus 2019	DPR Tuntut Percepatan Aturan Ibukota Baru	Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPR Melchias Markus Mekeng, mengatakan pemerintah harus mempercepat penyusunan regulasi untuk pemindahan ibukota.
15	Koran Tempo (Halaman Metro 1)	Rabu, 28 Agustus 2019	Ibukota pindah, Anies ingin bekas kompleks kementerian dan lembaga menjadi ruang hijau	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengincar bekas kompleks kantor kementerian dan lembaga bila ibukota negara jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur.
16	Media Indonesia (Halaman 3)	Rabu, 28 Agustus 2019	Ibukota Baru Berkonsep A City in The Forest	Menteri PUPR mengatakan ibukota negara yang akan dibangun untuk menggantikan Jakarta akan dibentuk sebagai kota cerdas dan modern berstandar internasional.

Judul	Perkuat Keandalan Listrik	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 1)		
Resume	Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim perlu didukung dengan suplai listrik yang mumpuni guna mewujudkan konsep kota ramah lingkungan dan sistem transportasi yang andal.		

Perkuat Keandalan Listrik

Bisnis, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur perlu didukung dengan suplai listrik yang mumpuni guna mewujudkan konsep kota ramah lingkungan dan sistem transportasi yang andal.

Ni Putu E. Wiratmini & Thomas Mola
redaksi@bisnis.com

Konsep ibu kota baru ramah lingkungan dan sistem transportasi yang andal, dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Konsep ini mencakup beberapa aspek a.l. penggunaan transportasi massal dan kendaraan listrik.

Penggunaan transportasi berbasis listrik yang ramah lingkungan ini membutuhkan suplai listrik yang kuat. Mengingat kebutuhan listrik Kalimantan Timur (Kaltim) akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan kebutuhan penerangan di instansi pemerintah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani menilai bahwa kendaraan listrik cocok di ibu kota baru karena ramah lingkungan.

Menurutnya, percepatan penggunaan kendaraan listrik harus dimulai dari pemerintah. Saat ini, imbuhnya, pemerintah telah membuat langkah maju dengan menggunakan kendaraan *hybrid* untuk mobil dinas menteri. "Saya pikir itu akan menjadi terobosan ibu kota yang menggunakan kendaraan listrik baik *hybrid* maupun baterai," ujarnya Selasa (27/8).

Rosan menuturkan, selain faktor harga, tantangan lain dalam pengembangan kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisian listrik dan pasokan listrik yang andal.

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Machnizon Masri memastikan, saat ini sistem kelistrikan di Kaltim sudah surplus 30%. Bahkan, sambungnya, pembangkit listrik dengan total kapasitas 800 MW akan beroperasi dalam waktu 2 tahun ke depan di Kalimantan. "Tidak usah khawatir dengan pasokan listrik di Kalimantan karena lebih dari cukup," katanya.

Berdasarkan data PT PLN, sistem

kelistrikan di Kaltim surplus 30%. Namun, seringkali terjadi pemadaman listrik karena terkendala sistem transmisi/interkoneksi.

Adapun, Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN Djoko Raharjo Abumanan menilai, pemilihan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sudah memperhitungkan berbagai hal sehingga wilayah itu paling siap dibandingkan dengan lokasi lain termasuk suplai kelistrikan. "PLN masih mengkaji kondisi kelistrikan kedua wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru tersebut," tuturnya.

Berdasarkan data PLN, jumlah pembangkit di Kalimantan Timur sebanyak 123 unit dengan total kapasitas 1.059 megawatt (MW). Daya mampu kelistrikan di Kaltim sebesar 959 MW.

Adapun, transmisi di Bumi Mulawarman itu terdiri atas sistem interkoneksi 150 kilovolt (kV) dan sistem *isolated* 20 kV. Konsumsi listrik di Kalimantan Timur *rerata* tumbuh 7,3% per tahun selama periode 2011—2017. (lihat grafik)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia Rizal Calvary mengatakan, saat ini cadangan listrik di Kalimantan sebesar 332 MW.

Dia menegaskan, produsen listrik swasta siap mendukung pemenuhan suplai listrik di Kaltim. "Kalimantan Timur dilihat dari sumber energi tidak ada persoalan. Di sana ada banyak batu bara, kelapa sawit, dan ada lagi sumber energi terbarukan seperti energi matahari," kata Rizal.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rancangan cetak biru sarana transportasi penunjang ramah lingkungan di ibu kota baru.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, infrastruktur perhubungan ini menjadi suatu pelengkap yang turut menentukan di ibu kota baru tersebut. Alat transportasi di ibu kota baru, katanya, dipastikan mengarah pada penggunaan *mass*

rapid transit (MRT) yang dinilai ramah lingkungan.

"Harus MRT karena angkutan massal adalah sesuatu keniscayaan apabila itu menjadi kota, apalagi kota besar. Rencananya pasti ada MRT, tetapi itu [dibangun] bertahap."

Selain itu, imbuhnya, infrastruktur yang paling penting adalah tersedianya fasilitas bandar udara.

Berdasarkan rancangan Bappenas, ibu kota negara akan dirancang dengan konsep kota hutan, ruang terbuka hijau minimal 50% dari total luas area meliputi taman rekreasi, ruang terbuka hijau, dan kebun binatang yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan daerah aliran sungai, dan struktur topografi.

Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono memastikan, sarana dan prasarana transportasi di ibu kota baru akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan dan transportasi.

Dari sisi infrastruktur telekomunikasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menuturkan, jaringan Palapa Ring akan disiapkan untuk memperkuat akses internet di Kaltim.

Menurutnya, Kementerian PUPR telah memiliki proyek pembangunan jalan raya di perbatasan Malaysia dan Indonesia.

M a s j a r
Proyek Divisi Perdagangan dan Industri

International Tropical Timber Organization (ITTO) Tetra Yanuariadi menambahkan, konsep kota hutan akan menguntungkan wilayah yang akan menjadi ibu kota baru di Kaltim. Pasalnya, wilayah yang sebagian besar dikelilingi hutan itu akan lebih terawasi pemerintah pusat.

PERAN SWASTA

Selain memastikan masalah pasokan listrik di Kaltim, Rosan P. Roeslani menyoroti peran swasta dalam proses pembangunan ibu kota baru. Menurutnya, dana yang dibutuhkan untuk pemindahan pusat pemerintahan sekitar Rp466 triliun, pemerintah hanya menyediakan sekitar Rp88,54 triliun dan 19% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Swasta berperan penting dalam proses pemindahan. Sekitar 81% dari swasta [skema kerja sama pemerintah dan badan usaha/KPBU], peran swasta sangat vital."

Terkait dengan infrastruktur dasar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, penyusunan desain infrastruktur dasar ibu kota baru dimulai sejak Presiden Joko Widodo menetapkan lokasi di Kaltim.

Pembangunan infrastruktur dasar akan dimulai pada pertengahan 2020. Infrastruktur dasar yang akan dibangun meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi serta gedung perkantoran.

"Desain kami mulai sekarang sampai dengan pertengahan tahun depan. Insyaallah *groundbreaking* prasarana

dasar bisa dimulai tahun depan."

Menteri PUPR menambahkan, setelah desain rampung, kebutuhan anggaran segera diajukan. Penggunaan anggaran, katanya, akan menggunakan skema *multiyears*.

Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Menkeu menuturkan, sejumlah pihak terkait pemindahan ibu kota, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan telah menyediakan beberapa pos pembiayaan yang dapat dimasukkan dalam RAPBN 2020. Namun, sambungnya, jumlah pembiayaan yang tercantum dinilai belum signifikan.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk lokasi ibu kota baru seluas 300.000 ha. "Kami siapkan lahan. Titiknya akan kami komunikasikan pemerintah pusat, Bappenas, dan presiden."

(Rivki Maulana/Thomas Mola/Mutiara Nabila/Krisia P. Kinnanti/Rinaldi M. Azka/Anitana W. Puspa/Gloria FK Lwi/Desyinta Nuraini/Leo D. Jatmiko)

RAMAH LINGKUNGAN

Pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur diharapkan menjadi kota yang ramah lingkungan dan transportasi. Penggunaan moda transportasi massal dan berbasis listrik akan mengurangi emisi.

Sistem Kelistrikan di Kalimantan Timur per 2018

Pembangkitan	Total Kapasitas
Pembangkit Listrik	1.058,5 MW
Gardu Induk (150 kV/20 kV)	1.540 MVA
Jaringan Tegangan Menengah	6.068 kms
Jaringan Tegangan Rendah	6.433 kms
Gardu Distribusi	978 MVA
Daya Mampu Neto	959,2 MW
Daya Mampu Pasokan Tertinggi	851,1 MW

Sumber: PLN

Transportasi Publik Ibu Kota Baru

- Angkutan massal berbasis rel (MRT).
- Angkutan massal berbasis bus.
- Non-motorized mode, seperti sepeda dan pedestrian yang terintegrasi dengan prasarana angkutan umum.

Infrastruktur Bandara

- Perlu perpanjangan landas pacu 2 bandara menjadi 3.000 m x 45 m dari saat ini 2.500 m x 45 m di Balikpapan & Samarinda.
- Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda.

Jumlah Node BTS di Jakarta dan Kaltim (Q1/2019)

Wilayah	2G	3G	4G
DKI Jakarta	9.501	17.213	13.601
Kalimantan Timur	2.538	4.561	3.297

Sumber: Kominfo



Sumber: Kemenhub & Bappenas, diolah

Bisnis/Amr Hilajat

Judul	Keberlanjutan di Ibukota Baru	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Pemerintah baru saja mengumumkan akan memindahkan ibukota negara ke Kaltim. Keputusan ini disambut gembira, termasuk para pengusaha.		

Keberlanjutan di Ibu Kota Baru

Pemerintah baru saja mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Keputusan ini disambut gembira, termasuk para pengusaha.

Bagaimana tidak. Kota baru artinya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Apalagi, kota yang akan dibangun adalah Ibu Kota Republik Indonesia, negara besar berpenduduk 260 juta orang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Bakal ada proyek-proyek baru di sana. Infrastruktur dan properti akan dibangun, serta sarana pendukung lainnya. Tentu banyak pihak yang akan terlibat dalam proyek raksasa senilai Rp466 triliun tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri.

Mengingat nilainya yang besar, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses pembangunannya. Jangan sampai muncul masalah di kemudian hari. Pemerintah juga harus menjamin bahwa lelang-lelang

proyek pembangunan ibu kota baru berlangsung transparan dan adil atau dengan kata lain, tidak menguntungkan segelintir pihak.

Lebih dari itu, konsep kota baru juga harus dimatangkan dengan benar dan komprehensif. Tidak perlu terburu-terburu karena pembangunan kota baru bukan proyek monumental yang harus kejar tayang.

Dan perlu diingat pula, tujuan utama pembentukan kota baru tidak hanya menciptakan sumber ekonomi baru, tetapi juga membangun perekonomian yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan alam.

Memang, pemerintah sudah memastikan bahwa dari total 180.000 hektare lokasi yang akan dibangun, sekitar separuhnya akan menjadi ruang terbuka hijau. Selain itu, hutan lindung di Kalimantan Timur tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto.

Namun, jika kita menilik sejarah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, ada pelajaran

berharga yang bisa diambil, khususnya dari sisi eksekusi *master plan* pengembangan kota.

Dalam *Master Plan* Djakarta 1965-1985 yang disusun pada masa pemerintahan Gubernur Soemarmo dan Ali Sadikin, misalnya, ditetapkan bahwa sekitar 37,2% wilayah DKI Jakarta atau sekitar 241,8 kilometer persegi menjadi ruang terbuka hijau.

Rencana tata ruang wilayah ini telah diganti beberapa kali. Namun, implementasinya jauh dari ekspektasi. Dari masa ke masa, ruang terbuka hijau tergerus oleh arus komersialisasi. Hutan beton hadir tak terbendung lagi.

Hasilnya adalah banjir, akses air bersih yang sulit, hingga polusi udara akut yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemacetan juga menjadi masalah serius yang berdampak negatif bagi laju perekonomian.

Oleh karena itu, *master plan* untuk ibu kota baru nanti—yang hingga kini belum ditentukan namanya—harus secara konsisten dijalankan oleh Pemerintah Indonesia,

tidak peduli siapa yang akan menjabat setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

Rencana alokasi ruang hijau sebesar 50% harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Pemerintah harus tegas dan konsisten melaksanakan aturan, sedangkan para pengusaha juga harus berkomitmen untuk mendukung hal ini.

Perumusan *master plan* ibu kota baru diharapkan tidak hanya mencakup kota itu sendiri, tetapi juga perencanaan pembangunan kota-kota penyangga di sekitarnya yang akan mendukung keberadaan ibu kota baru tersebut.

Karena percuma saja ibu kota baru tersebut memiliki ruang terbuka hijau yang luas, sedangkan pengembangan kota-kota penyangga ternyata harus membabat habis hutan di sekelilingnya. Pemerintah harus tegas bahwa pembangunan ekonomi di Pulau Kalimantan akan mengutamakan asas keberlanjutan.

Kalimantan adalah 'paru-paru' Indonesia. Jika ia tidak dijaga, Indonesia akan sekarat nantinya. ☐

Judul	Partisipasi Badan Usaha Tetap Dibuka	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Partisipasi usaha dalam penyelenggaraan SPAM berpotensi terus berlanjut. RUU SDA bakal membuka keran kerjasama antara badan usaha dengan pemegang izin.		

Partisipasi Badan Usaha Tetap Dibuka

Bisnis, JAKARTA — Partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) berpotensi terus berlanjut. Rancangan undang-undang tentang sumber daya air (SDA) bakal membuka keran kerja sama antara badan usaha dengan pemegang izin.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan partisipasi badan usaha dibuka pada kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemegang izin perusahaan SDA. Dia mengemukakan, izin perusahaan SDA tetap dimiliki negara melalui badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik desa (Bumdes).

"Izin semua dipegang negara melalui BUMN, BUMD, dan Bumdes. Tetapi untuk penyelenggaraan dan pendanaan prasarana, bisa dengan pihak swasta," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin malam (26/8).

Dia menggambarkan, pola kerja sama antara badan usaha dengan pemegang izin perusahaan SDA akan serupa dengan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Misalnya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang jalan tol.

Basuki sebelumnya mengatakan partisipasi swasta dalam perusahaan SPAM tetap diperlukan karena kapasitas anggaran negara terbatas. Dia menyebut, untuk menambah sepuluh juta sambungan baru dibutuhkan investasi sebanyak Rp150 triliun

► Pola kerja sama antara badan usaha dengan pemegang izin perusahaan SDA akan serupa dengan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Dalam catatan Bisnis, peluang kerja sama di bidang air minum sangat terbuka. Pasalnya, akses layanan air minum melalui jaringan perpipaan masih rendah, sekitar 29%. Sejauh ini, proyek KPBU di bidang air minum juga belum marak. Baru ada tiga proyek KPBU yang sudah berjalan, yaitu SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Semarang Barat.

Berdasarkan data Bappenas, ada dua proyek KPBU lain di sektor SPAM yang sudah masuk ke tahap transaksi, yaitu SPAM Pekanbaru, SPAM Jatiluhur I. Kapasitas produksi air bersih di dua proyek itu masing-masing 750 liter per detik (lpd) dan 5.000 lpd.

Di luar skema KPBU, sedikitnya ada dua proyek kerja sama PDAM dengan badan usaha yang sudah berjalan, yaitu SPAM Dumai dan SPAM Gresik. Di SPAM Dumai, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Adaro Tirta Mandiri berkongsi membentuk perusahaan bernama PT Dumai Tirta Persada. Perusahaan ini bekerja sama dengan PDAM Dumai Tirta Berseri.

Adapun di Gresik, PT PP (Persero) Tbk. bermitra dengan PT Krakatau Tirta dalam proyek SPAM Gresik berkapasitas 1.000 lpd. Keduanya membentuk PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta yang kemudian bekerja sama dengan PDAM Giri Tirta Gresik.

Direktur QHSE & Pengembangan Adhi Karya Partha Sarathi mengatakan pemberian ruang kerja sama bagi badan usaha di bidang air minum memberikan angin segar bagi para investor. "Tentu ini memberikan kepastian," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (27/8).

PEKAN DEPAN

Di sisi lain, pengesahan RUU SDA menjadi undang-undang dijadwalkan pada pekan depan. Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis mengatakan seluruh fraksi di Komisi V sudah sempat membawa RUU SDA ke pembahasan tingkat kedua pada rapat paripurna. "Kami akan lanjutkan di bamus (badan musyawarah). Kalau tidak ada halangan, minggu depan kami bisa lakukan paripurna."

Dalam pembahasan tingkat pertama, hanya ada satu usulan perubahan substansi dari pemerintah, yaitu penambahan ayat pada pasal 33. Pasal itu mengatur pelarangan penggunaan sumber daya air di wilayah konservasi.

Pemerintah meminta larangan itu dikecualikan bagi penduduk yang tinggal di daerah konservasi. Penggunaan sumber daya air juga dibolehkan selama ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Secara keseluruhan, Panitia Kerja RUU SDA telah menyusun rancangan berisi 16 bab dan 79 pasal. Penyusunan RUU SDA sudah ditunggu banyak pihak setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada 2015 lalu. ☒

POTENSI AIR UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT



Judul	Pengembang Mulai Terancam	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pengembang perumahan bersubsidi mulai merasa terancam dengan belum juga ditambahnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), padahal sudah hampir tidak ada lagi pembiayaan tersebut.		

Pengembang Mulai Terancam

Bisnis, JAKARTA — Pengembang perumahan bersubsidi mulai merasa terancam dengan belum juga ditambahnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), padahal sudah hampir tidak ada lagi pembiayaan tersebut.

Mutiara Nabila
redaksi@bisnis.com

Selasa (27/8).

Hal ini terungkap dalam pertemuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan sejumlah asosiasi pengembang, di antaranya Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI), Pengembang Indonesia (PI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Ketua Komitap Kadin Properti dan Ketua Umum REI periode 2010-2013 Setyo Maharso mengatakan bahwa dengan belum jelasnya tambahan kuota FLPP tersebut membuat proyek sejumlah pengembang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terganggu.

Menurutnya, hal itu akan berdampak dengan perusahaan di belakang industri properti yang mencapai 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran roda perekonomian, seperti industri perumahan sampai industri berat.

"Jadi kondisi ini berbahaya jika dibiarkan tanpa ada solusi apa-apa," katanya sesuai pertemuan tersebut

Ketua Umum PI, Barkah Hidayat mengatakan bahwa pada Juli kuota FLPP sudah menipis di sejumlah bank pelaksana. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah berupaya mengatasinya dengan memindahkan kuota dari sejumlah bank pelaksana yang masih tersisa ke bank lain yang butuh, yang terkumpul sekitar 5.000 unit.

Namun, lanjutnya, jumlah itu dirasa sangat kurang karena permintaan sangat besar, sehingga pengembang tetap membutuhkan tambahan. Dia mengakui bahwa sulit untuk mengandalkan tambahan dari APBN, dan harapan mereka adalah adanya pemindahan dari anggaran yang belum terpakai untuk digunakan untuk pembangunan perumahan sebagai FLPP.

"Dari PUPR sudah mengupayakan adanya tambahan kuota itu dan sudah

► **Bila tak ada langkah konkret terkait penambahan kuota FLPP, akan banyak masyarakat yang terancam gagal melaksanakan akad kredit.**

► **Apabila sampai Desember tambahan anggaran FLPP tak kunjung turun, Junaidi menegaskan bahwa banyak anggota Apersi dan asosiasi lainnya yang akan tumbang dan bangkrut.**

disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan. Kami sangat menunggu kabar baik."

Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum DPP REI, mengatakan pada Mei lalu, sudah ada pertemuan dengan pihak terkait yang membahas kebutuhan kuota FLPP. Waktu itu, katanya, disebutkan kebutuhan pengembang mencapai 168.000 unit atau dengan harga rumah subsidi yang berlaku saat ini setara dengan 150.000 unit. Adapun realisasinya saat itu mencapai 105.000 unit, sehingga untuk Mei masih butuh sekitar 50.000 unit.

Kalau mengacu realisasi tahun lalu yang berjumlah 256.000 unit, kata-

nya, jumlah kuota untuk tahun ini sebenarnya sudah sangat berkurang. "Makanya kemudian kita hitung ulang dan kita minta FLPP dan SSB [subsidi selisih bunga] tahun ini untuk 286.000 unit, dengan perhitungan bertambah 30.000 unit dari tahun lalu."

Berdasarkan catatan *Bisnis*, tahun ini anggaran untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) hanya 100.000 unit dan FLPP hanya 68.000 unit. Jumlah itu jauh dari anggaran tahun lalu yang total keduanya mencapai 280.000-an unit.

Ketua Umum Himpunan Perumahan Rakyat (Himpera) Endang Kawidjaja menilai saat ini keputusan penyaluran KPR FLPP berada di tangan Menkeu. Bila tak ada langkah konkret, akan banyak masyarakat yang terancam gagal melaksanakan akad kredit. "Pekan lalu sudah ada sekitar 200 konsumen yang gagal akad."

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Joko Suranto menambahkan dampak menipisnya FLPP sudah mengganggu pengembang. Di Subang, katanya, sejumlah pengembang sejak April sudah menghentikan kegiatan pembangunan. Hal itu dipastikan akan berdampak pada mundurnya penyerahan unit hunian kepada konsumen. "Artinya, kesulitan keuangan unit nyata," tandasnya.

Saat ini pemerintah dinilai terlalu banyak melakukan pengaturan hal-hal yang bersifat sangat teknis, sehingga mempersempit gerak pengembang.

Hendro S. Gondokusumo, Wakil Ketua Umum Kadin Properti, berharap Menteri Keuangan segera mengambil keputusan untuk mengeluarkan tambahan kuota tersebut. "Kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri properti di Indonesia secara keseluruhan."

UNJUK RASA

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdullah menegaskan pihaknya siap berorasi dan turun ke jalan jika kuota FLPP tidak ditambah, karena dampaknya kepada pengembang dan industri turunannya termasuk perbankan besar sekali.

"Apersi siap turun ke jalan untuk minta FLPP ini. Kami akan segera minta koordinator lapangan kalau permintaan ini tidak juga dikabulkan dalam waktu dekat, supaya jangan diulur-ulur lagi," katanya ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Apersi di Jakarta, Selasa (27/8).

Apabila sampai Desember tambahan anggaran FLPP tak kunjung turun, Junaidi menegaskan bahwa banyak anggota Apersi dan asosiasi lainnya yang akan tumbang dan bangkrut. "Ini perlu perlindungan dari pemerintah," ujarnya.

Di Apersi sendiri, jumlah unit yang sudah terbangun tetapi sudah tak tertampung oleh FLPP dari 17 daerah ada sekitar 98.000 unit, padahal anggotanya tersebar di 28 daerah. Diperkirakan kebutuhannya masih mencapai 100.000 unit lebih di Apersi saja.

"Minggu ini aja sudah ada dua pengembang yang mau menjual asetnya, belum lagi yang tiap hari tanyakan kuota. Jadi PUPR harus menjelaskan kuota sebetulnya tinggal berapa. Lalu kalau mau digeser ke BP2BT [Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan] kuotanya cuma 14.000 unit, banyak pula syaratnya, berat sekali buat kami pengembang," jelasnya.

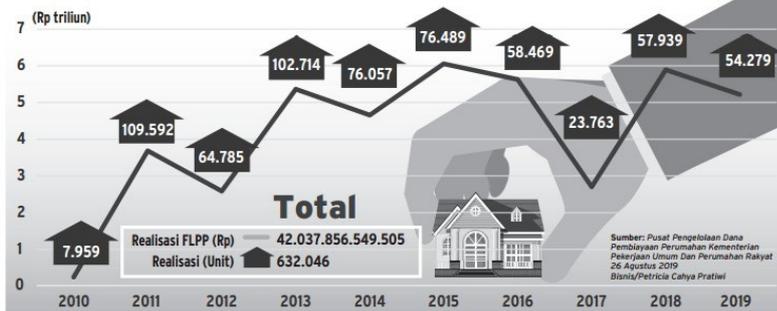
Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali menambahkan bahwa bicara soal rumah subsidi, jika ada 100.000 unit tak dapat FLPP, artinya ada 100.000 orang gagal terpenuhi kebutuhannya akan rumah. Pembeli bisa meminta uang mukanya kembali dan akan menimbulkan masalah bagi pengembang.

Kemudian, pengembang yang harus mengembalikan uang muka jadi gagal bayar kredit konstruksi, muncullah kredit bermasalah di perbankan, yang artinya merusak nama bank pemberi pinjaman juga.

Selain penambahan kuota, Apersi mengharapkan Kementerian PUPR juga tidak memberikan aturan-aturan yang memberatkan pengembang. "Di kala pasar properti lesu, hanya pasar MBR yang masih jalan. Dengan aturan yang memberatkan, pengembang MBR tidak bisa bergerak, lalu pasar properti Indonesia mau diapakan?" imbuh Junaidi. (M. Rochmad Purboyo)

Kuota FLPP Menipis

Pengembang semakin kesulitan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena bank pelaksana sudah tidak mampu menyalurkan FLPP yang kuotanya memang sudah hampir habis.



Judul	Perumahan Rakyat: Rusun Menjawab Keterbatasan Lahan	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Penyediaan hunian yang layak bagi rakyat terbentur harga lahan yang terus meningkat. Keterbatasan lahan diatasi dengan lokasi perumahan rakyat yang terintegrasi penataan kota dan transportasi massal.		

PERUMAHAN RAKYAT

Rusun Menjawab Keterbatasan Lahan

JAKARTA, KOMPAS — Penyediaan hunian yang layak bagi rakyat terbentur harga lahan yang terus meningkat. Keterbatasan lahan diatasi dengan lokasi perumahan rakyat yang terintegrasi penataan kota dan transportasi massal.

Konsep rumah susun atau apartemen sewa bisa menjadi solusi penyediaan hunian terjangkau bagi rakyat. Sebab, jika mengikuti lokasi lahan yang harganya terjangkau, pembangunan kota akan semakin melebar dan tidak teratur.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dikutip Selasa (27/8/2019), sekitar 17,36 persen dari 64 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki hunian sendiri. Di sisi lain, perumahan dan permukiman yang semakin jauh dari pusat kota tidak didukung jaringan infrastruktur dan tidak sesuai rencana tata ruang.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 2010-2018, penduduk perkotaan di Indonesia bertambah 27 juta orang, dengan laju pertumbuhan 2,5 persen per tahun. Peningkatan jumlah penduduk di kota ini menekan kawasan perkotaan. Hal ini mesti diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.

"Daripada kontrak mahal dan jauh dari pusat kota yang membuat waktu tidak efektif serta beban ongkos transportasi, pemerintah ingin membangun rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang terjangkau," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid.

Kementerian PUPR tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mencari lahan yang dapat menjadi lokasi rumah susun terintegrasi pasar atau kawasan komersial. Rencana lain, membangun rusunawa di dalam kawasan industri sehingga pekerja tinggal tidak jauh dari lokasi kerja.

Salah satu contoh hunian sewa yang terintegrasi atau berlokasi dekat kawasan industri adalah rusunawa di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Adapun contoh rusunawa terintegrasi dengan pasar adalah rusunawa Pasar Rumpit, Jakarta, yang baru selesai dibangun.

Saat ini, lanjut Khalawi, sekitar 20 pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan dan mengajukan program hunian sewa kepada pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran pemerintah akan diatasi dengan melibatkan swasta untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dan

(Bersambung ke him 11 kol 1-5)

Rusun Menjawab Keterbatasan Lahan

(Sambungan dari halaman 1)

rusunawa di lokasi yang sama.

Kendali

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, integrasi area permukiman dan transportasi publik merupakan solusi dari persoalan perumahan. Pembangunan infrastruktur harus menjangkau kota-kota sekunder sehingga biaya transportasi bisa ditekan. "Di Jawa, tidak ada solusi selain membuat moda transportasi terintegrasi dengan kawasan perumahan atau membangun apartemen," katanya.

Menurut Ari, kebutuhan hunian di Jawa makin sulit terpenuhi karena ketersediaan lahan yang terbatas.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mendukung penyediaan hunian

vertikal di perkotaan. Penerapan konsep itu membuat penggunaan ruang di perkotaan kian efisien. Masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian layak dan terjangkau.

Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Harison Mocodompis menuturkan, masalah dalam menyediakan perumahan bagi rakyat terutama terkait penyediaan lahan. Negara hampir tak mempunyai kendali terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan rakyat.

Harison menambahkan, dalam RUU Pertanahan akan diatur mengenai bank tanah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang. Dengan keberadaan bank tanah, pemerintah dapat merencanakan dan mengelola tanah milik negara.

Panangian Simanungkalit dari Panangian School of Property menyebutkan, di tengah

kondisi harga lahan yang kian tinggi, penyediaan hunian sewa dapat menjadi solusi mengatasi kekurangan rumah. Namun, untuk mewujudkannya, pemerintah perlu mendorong suplai rumah baru dan suplai rumah sewa. "Penyediaan rumah sewa dapat menjadi solusi pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai akhirnya mampu memiliki rumah sendiri," katanya.

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, membangun rusunawa bagi warga yang berpenghasilan sebesar upah minimum kota/kabupaten. Rusunawa ini diminati sehingga calon penghuni mesti antri.

Harga rumah yang tak terjangkau bagi Anggi (25) membuatnya indekos di tengah kota Surabaya. Pilihan itu diambil agar ongkos transportasi ke tempat kerja di pusat kota menjadi lebih murah.

Berdasarkan data Kement-

rian PUPR, kekurangan rumah saat ini mencapai 11,4 juta unit. Adapun kebutuhan rumah per tahun mencapai 800.000 unit.

Terkait penyediaan rumah murah, Director, Head of Research & Consultancy Savills Anton Sitorus mengingatkan, Perumnas mesti kembali ke tugas awalnya sebagai BUMN yang menyediakan rumah murah. Jangan sampai muncul kesan proyek rumah yang digarap Perumnas kian jauh dari misi penyediaan rumah murah.

Anggaran subsidi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah menambah anggaran subsidi perumahan berskema fasilitas likuiditas penyediaan perumahan (FLPP). Sebab, selain memastikan keberlanjutan bisnis pengembang, subsidi perumahan juga dapat berdampak terhadap industri lain.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Properti Setyo Maharso menuturkan, selama ini pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu penggerak sektor properti.

"Kuota FLPP yang habis memberikan ketidakpastian bagi pengembang. Padahal, pembangunan rumah FLPP yang masif ini merupakan salah satu cara mendongkrak perekonomian, baik dari industri rumah tangga maupun industri berat. Sebab, ada 174 industri ikutan di industri properti," kata Setyo di Jakarta, Selasa.

Sampai dengan 26 Agustus, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan telah menyalurkan FLPP ke bank pelaksana untuk 54.279 unit rumah senilai Rp 5,21 triliun. Alokasi anggaran tahun ini ditujukan untuk 68.000 unit rumah subsidi.

(NAD/KRN/FER/LKT/SYA/ETA)

Judul	Menuju Kota Bisnis dan Niaga Global	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah berkomitmen terus menjadikan Jakarta sebagai prioritas pembangunan serta mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan yang berskala regional dan global.		

REGENERASI JAKARTA

Menuju Kota Bisnis dan Niaga Global

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah berkomitmen terus menjadikan Jakarta sebagai prioritas pembangunan serta mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan yang berskala regional dan global. Proyek Jakarta Urban Regeneration senilai Rp 571 triliun dalam 10 tahun tengah dijalankan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai *leading sector*.

"Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, DKI Jakarta terus dikembangkan menjadi kota *urban regeneration* yang anggarannya disiapkan Rp 571 triliun dari APBD, APBN, swasta, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Jakarta diharapkan menjadi kota bisnis dan niaga seperti New York di Amerika Serikat," kata Wapres Kalla, yang juga pengarah Jakarta Urban Regeneration, kepada *Kompas*, Selasa (27/8/2019) di Jakarta.

Menurut Kalla, sejak Maret 2019, pembahasan Jakarta Urban Regeneration sudah dilakukan di kantornya pada tingkat koordinasi antarmenteri dan lembaga serta Pemprov DKI, juga di tingkat teknis. Presiden, dalam rapat terbatas di Kompleks Istana, sebelumnya menyetujui Wapres Kalla menjadi pengarah proyek tersebut.

Proyek Jakarta Urban Regeneration direncanakan berlangsung pada 2019 hingga 2030, mencakup sistem terpadu moda transportasi MRT, LRT, Transjakarta; air bersih; pengelolaan air kotor; rumah murah; serta penanganan banjir dan revitalisasi angkutan kota. Dari proyek terpadu itu, tiga proyek didahulukan, yaitu MRT dari 15 kilometer menjadi 120-220 kilometer, perumahan rakyat, dan penanganan banjir.

Dari anggaran Rp 571 triliun selama 10 tahun, pembiayaannya dilakukan dengan kombinasi, yakni berasal dari APBD DKI 32 persen, obligasi atau pinjaman daerah 18 persen, APBN 38 persen, serta swasta dan KPBU 12 persen.

Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Wijayanto Samirin, yang ditugaskan khusus untuk membantu Jakarta Urban Regeneration, menyatakan, sisi positif dari rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain

Menuju Kota Bisnis

(Sambungan dari halaman 1)

membuat Jakarta lepas dari beban kesemrawutan kota seperti saat ini, dari kemacetan hingga demo yang kerap terjadi.

Anies mengatakan, fokus bidang air bersih adalah peningkatan jangkauan hingga di atas 95 persen warga. Dalam bidang transportasi terdapat empat sub-agenda, yaitu transportasi kereta api, transportasi darat bus hingga bus mikro, dan pembangunan fasilitas utilitas.

Anies mengatakan, perpindahan ibu kota tak perlu dikhawatirkan membuat investasi meninggalkan Jakarta. Bahkan, katanya, perpindahan itu bisa lebih banyak menciptakan ruang terbuka hijau di bekas-bekas kantor yang bisa dimanfaatkan menjadi taman di

tempat-tempat strategis.

Dipadu kekayaan sejarah, diharapkan Jakarta selalu jadi tujuan wisata. "Kan bagus taman-taman di tempat strategis, bisa juga sebagian jadi kantor. Kalau jadi kantor, artinya ada kegiatan konstruksi. Kalau ada kegiatan konstruksi, artinya ada pergerakan ekonomi, banyak yang bekerja," ujarnya.

Namun, Anies ragu perpindahan ibu kota akan menurunkan kemacetan dan juga polusi. Sebab, kini kemacetan terbesar bersumber dari transportasi rumah tangga dan aktivitas transportasi keluarga bisnis. Keduanya tetap akan ada di Jakarta. Oleh karena itu, kata Anies, transportasi umum di DKI Jakarta tetap harus diperbaiki.

(HAR/IRE)

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-2)

Judul	Perkuat Kajian Sosial dan Lingkungan	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Kajian sosial dan lingkungan di lokasi calon ibukota negara di Kaltim perlu diperkuat. Rancangan dasar hukum pemindahan juga mendesak segera disusun.		

Perkuat Kajian Sosial dan Lingkungan

Kajian sosial dan lingkungan di lokasi calon ibu kota negara di Kalimantan Timur perlu diperkuat. Rancangan dasar hukum pemindahan juga mendesak segera disusun.



Foto aerial kawasan Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Samboja merupakan kawasan yang dipersiapkan untuk menjadi area ibu kota baru Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Pemindahan ibu kota negara RI ke Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki dampak lingkungan dan sosial yang serius, serta biaya yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang menyeluruh di lokasi ibu kota yang baru, terutama terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kajian ini juga menjadi penting karena di sekitar lokasi ibu kota yang baru terdapat wilayah konservasi, seperti Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto dan Teluk Balikpapan.

Di saat yang sama, lahan untuk lokasi ibu kota negara, yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, mendesak segera ditetapkan. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim bisa segera membuat kawasan khusus nonkomersial untuk menjaga kawasan itu dan mencegah adanya gejolak sosial yang tidak perlu.

Langkah itu dibutuhkan karena sesuai penelusuran *Kompas*, Selasa (27/8/2019), di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, warga kian gencar menjual tanahnya. Sepanjang hampir 40 kilometer menyusuri pesisir Jalan Balikpapan-Samboja, yang banyak disebut akan menjadi lokasi ibu kota, terlihat lebih dari 30 papan baru berisi pengumuman tanah dijual. Padahal, status kepemilikan tanah belum jelas. Bisa jadi tanah yang dijual berstatus kawasan konservasi, hak milik, tanah negara, atau lainnya.

Di Kelurahan Bukit Merdeka, Samboja, misalnya, harga jual tanah pada awalnya Rp 60.000-Rp 100.000 per meter persegi. Setelah muncul isu pemindahan ibu kota dengan salah satu calon ialah Kaltim, harga tanah naik menjadi Rp 1,5 juta per meter persegi. Sehari setelah Presiden Joko Widodo

mengumumkan rencana pemindahan ibu kota pada Senin lalu, harga jual tanah melonjak menjadi Rp 10 juta per meter persegi.

Selain menawarkan tanah dengan harga tinggi, pemilik tanah seperti Kus dari Sulawesi Selatan juga tengah berusaha mendapatkan sertifikat untuk tanahnya di Bukit Merdeka, Samboja.

Padahal, menurut Sekretaris Lurah Bukit Merdeka Antonius Pakalla, tanah Kus masuk dalam wilayah Tahura Bukit Soeharto. Dengan demikian, tanah itu tak bisa diperjualbelikan karena milik negara.

Hasil kajian

Dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, surat dari Presiden Joko Widodo

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-2)

Perkuat Kajian Sosial

(Sambungan dari halaman 1)

terkait hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim telah diterima.

Namun, dalam surat itu belum dilampirkan naskah akademik dan draf regulasi yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota. Padahal, sesuai kajian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, setidaknya ada lima undang-undang (UU) yang perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau dibuat baru, dan dua UU harus dibuat baru.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Yandri Susanto mengingatkan, semua landasan hukum untuk pemindahan ibu kota harus dituntaskan dulu sebelum pembangunan dilakukan di lokasi yang baru. "Jika pembangunan dilakukan tanpa undang-undang, itu berarti tindakan ilegal," ucapnya.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pembahasan regulasi sebagai payung hukum pemindahan ibu kota tidak sederhana dan membutuhkan waktu.

Terkait hal itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan, putusan yang dibuat pemerintah tentu punya alasan yang baik. "Saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, naskah akademik dan pembahasan RUU yang menjadi dasar untuk ibu kota baru akan tuntas pada 2020. Dengan demikian, pada akhir 2020, pembangunan fisik ibu kota sudah dimulai di Kaltim.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, kajian tentang dampak lingkungan hidup dari pemindahan ibu kota negara ke Kaltim akan diselesaikan dalam dua bulan. Pe-

nyusunan kajian itu akan melibatkan penggiat lingkungan hidup dan tokoh lainnya.

Pemerintah, lanjut Siti, berkomitmen untuk menjaga wilayah konservasi, seperti Tahura Bukit Soeharto dan Teluk Balikpapan. "Presiden memberikan arahan, dalam persiapan pemindahan ibu kota ini, kita sekaligus memperbaiki taman hutan rakyat dan kawasan konservasi. Kita juga sambil memperbaiki sisa-sisa lahan bekas tambang," tuturnya.

Sebagian lahan dari calon ibu kota negara yang baru, menurut Siti, memang mengambil wilayah hutan industri. Namun, hal ini bukan masalah. Pasalnya, dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan disebutkan, penggunaan dan pemanfaatan hutan ditentukan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Selain itu, jika ada kebijakan nasional, pengalokasian hutan bisa ditinjau ulang.

Aparatur sipil negara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menuturkan, ada 180.000 aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke ibu kota negara baru di Kaltim. ASN yang akan dipindahkan adalah mereka yang bertugas di instansi pemerintah pusat, yakni kementerian dan lembaga, serta bukan yang bertugas di pemerintah daerah.

Syafruddin juga menegaskan ibu kota negara yang baru dirancang jadi kota cerdas yang ramah lingkungan. Semua fasilitas dibangun, mulai dari perkantoran, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.

Sejumlah ASN di Kementerian Sekretariat Negara mengaku siap jika pindah ke ibu kota negara baru. "Saya siap karena sejak tes CPNS sudah berjanji siap ditempatkan di mana pun di wilayah Indonesia," ujar Rusmin Nuryadin, Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Wakil Presiden.

(GAL/NTA/ICH/INA/REK/CIP/BRO/AGE/DVD/INK/SAN)

Judul	Amankan Kebutuhan Lahan	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	Harga lahan yang terus meningkat adalah permasalahan yang dialami pemerintah, termasuk dalam menyediakan perumahan rakyat.		

Amankan Kebutuhan Lahan

Harga lahan yang terus meningkat adalah permasalahan yang dialami pemerintah, termasuk dalam menyediakan perumahan rakyat. Masalah ini mesti diantisipasi agar tak terjadi di Kaltim.

JAKARTA, KOMPAS — Penguasaan lahan oleh pemerintah di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur, merupakan langkah yang tepat. Dengan cara itu, kemungkinan spekulasi lahan dapat diminimalisasi.

Selama ini, salah satu kesulitan yang dialami pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi rakyat adalah harga tanah yang terus meningkat.

Di sisi lain, ketiadaan spekulasi lahan akan membuat swasta lebih tertarik berperan dalam proses pemindahan ibu kota RI dari Jakarta.

"Pemerintah harus mengamankan semua kebutuhan lahan, baik untuk pemerintah, publik, maupun tujuan komersial. Nantinya pengembang akan membeli dari negara," kata Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (RED) Soelaeman Soemawinata di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Kepastian hukum terkait lahan dan pengembangannya, kata Soelaeman, membuat pengembang lebih terjamin. Pengembang dapat masuk ke berbagai sektor, antara lain penyediaan hunian. Pengembang perumahan berperan mengembangkan lahan yang disediakan pemerintah melalui konsep kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

○ Rancangan RPJMN 2020-2024: Perumahan dan Permukiman

○ Arah kebijakan

- Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

○ Strategi

<ul style="list-style-type: none"> ○ 1. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan. ○ 2. Reformasi subsidi perumahan. ○ 3. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan. ○ 4. Keterpaduan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi. ○ 5. <i>Inclusive urban renewal</i> dan konsolidasi tanah. ○ 6. Sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman. ○ 7. Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN. ○ 9. Standar keamanan dan kelayakan bangunan. ○ 10. Kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan. ○ 11. Peningkatan kapasitas. ○ 12. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan.
--	---



Sumber: Bappenas

INFOGRAFIK: TURMA

Melalui konsep tersebut, lahan dan infrastruktur dasar disediakan pemerintah, sedangkan pengembangannya dilakukan swasta.

Rencana induk

Kepastian pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mendorong pengembang melirik lahan di kawasan itu. Namun, pengembang masih menunggu rencana

induk pengembangan kawasan.

Direktur Pemasaran Paramount Land, Alvin Andronicus, di Jakarta, Selasa, menyatakan sudah melirik lahan di Kaltim. Pihaknya akan menggarap proyek hunian dan komersial.

"Pemerintah mencanakan dulu rencana induk kawasan sehingga swasta bisa mulai masuk ke kawasan itu," ujarnya.

Menurut Alvin, pemindahan ibu kota negara tidak hanya membuka peluang permintaan

perumahan dari aparat sipil negara (ASN), tetapi juga kebutuhan rumah bagi karyawan perusahaan swasta yang menggarap proyek di kawasan itu.

Direktur PT Ciputra Development Tbk Artadinata Djangkar mengaku telah menggarap proyek properti di Samarinda dan Balikpapan sejak 2008. Semua proyek digarap melalui kerja sama dengan pemilik lahan lokal. "Kami masih memiliki bank tanah, terutama ka-

rena kami bermitra dengan pemilik lahan lokal," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2019, Ciputra Development bekerja sama dengan pengembang lain untuk menggarap hunian di Balikpapan dan Samarinda.

Artadinata mengatakan, pemindahan ibu kota negara yang diikuti dengan kepindahan ASN merupakan peluang bagi industri properti. Pihaknya tak akan terburu-buru membidik pengembangan proyek baru, tetapi menunggu rencana induk ibu kota negara sebelum memutuskan untuk menggarap proyek baru. Saat ini, proyek-proyek properti di Samarinda dan Balikpapan yang masih berjalan akan diselesaikan lebih dulu. "Kami masih menunggu aturannya. Pemindahan ibu kota membutuhkan persiapan pembangunan jangka panjang," katanya.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat, pemindahan ibu kota tidak terlalu berdampak terhadap pengusaha. Alasannya, pengusaha tidak perlu pindah.

Namun, Sofjan mengingatkan agar rencana pemindahan ibu kota dan prosesnya tidak membuat pemerintah kehilangan fokus memperhatikan perekonomian. (NAD/LKT/FEH)

Judul	Rumah Tapak Tak Dibangun	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 2)		
Resume	Saat ibukota negara pindah ke kaltim pada 2024, akan ada sekitar 1,5 juta orang pindah, mulai dari pejabat beserta keluarga dan tenaga jasa pendukungnya.		

Rumah Tapak Tak Dibangun

Saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur pada 2024, akan ada sekitar 1,5 juta orang pindah, mulai dari pejabat beserta keluarga dan tenaga jasa pendukungnya.

Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Total luas kawasan ibu kota negara yang baru mencapai 180.000 hektar, dengan kawasan inti 40.000 ha.

Pembangunan tahap pertama, yaitu pada 2020-2024, di lahan seluas 6.000 ha. Fokus pembangunan tahap ini adalah *government district*, yang mencakup gedung parlemen dan kantor yudikatif. Setelah itu, pembangunan meluas lagi jadi 40.000 ha, di antaranya untuk permukiman, dukungan kegiatan-kegiatan bisnis terkait pemerintah dan lainnya, seperti universitas dan *science technopark*.

"Paling lambat 2024 sudah ada pemindahan dan ada status ibu kota yang baru. Jadi, ibu kotanya resmi fungsional. Istana, semua kementerian akan pindah, juga parlemen," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro di rumah dinasny di Jakarta, Selasa (27/8/2019). Berikut petikan wawancaranya.

Lalu lahan seluas total 180.000 hektar untuk apa?

Dari total lahan 180.000 ha itu, minimal 50 persen untuk ruang terbuka hijau. Konsep *forest city* akan kita dorong. Dan, Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto yang termasuk wilayah 180.000 ha jadi ruang terbuka hijau, yakni hutan konservasi. Bahkan kawasan itu mau kita rehabilitasi karena banyak pemukiman ilegal dan sawit.

Selain kompleks perkantoran pemerintah dan legislatif, infrastruktur apa lagi di pembangunan tahap I?

Kita akan siapkan rumah dinas yang bangunannya vertikal karena arahan Presiden jangan ada rumah tapak di ibu kota baru. Tetapi juga ada batasan tinggi agar konsep hutan tetap utama. Di pantai, kami ingin bangun basis angkatan laut dan angkatan darat di Samboja, dekat pantai. Angkatan udara, karena butuh pesawat presiden yang akan dibangun dekat arah

Penajam.

Bagaimana dengan infrastruktur kota?

Kita ingin infrastruktur yang modern. Misal, kabel listrik tak boleh di atas jalan. Semua di bawah tanah. Tidak boleh lagi ada yang pakai elpiji untuk masak. Semua pakai jaringan gas. Air bersih kalau bisa sudah air minum. Lalu, air limbah langsung pakai saluran ke instalasi pengolahannya. Jadi kami ingin membangun konsep kota yang jadi referensi kota-kota lain.

Air baku dan listriknya?

Ya, ada air tanah dan ada air sungai. Kementerian PU akan membuat bendungan dekat-dekat situ. Cukup untuk 1,5 juta orang. Listriknya, rencananya energi bersih dan terbarukan. Basisnya kita akan coba pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar karena ada tanah kosong. Kemudian ada pula bio massa. Untuk memperkuatnya, akan ada gas. Meskipun tak terbarukan, gas tergolong energi bersih.

Siapa yang akan pindah untuk tahap pertama?

Untuk 2024, aparat sipil negara beserta pejabat negara 50.000-100.000 orang. Ini belum termasuk keluarga. Ada pula sebagian TNI dan Polri. Perkiraan awal, belum sampai 500.000 jiwa. Sementara total jumlah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang direncanakan pindah 180.000-190.000 orang. Jika rata-rata satu keluarga terdiri empat orang, akan ada sekitar 800.000 orang pindah. TNI dan Polri sekitar 25.000 orang. Sisanya orang-orang yang menyediakan jasa pendukung. Ujung-ujungnya, 1,5 juta jiwa. Kota didesain dalam 5-10 tahun untuk dihuni 1,5 juta jiwa.

Adaantisipasi jika proyek molor?

Pembangunan tahap pertama adalah jalan tol yang menghubungkan ibu kota baru dengan Balikpapan dan Samarinda. Jika ada kemunduran jadwal pembangunan, pemindahan sebagian aktivitas pemerintahan bisa dengan dukungan sementara dari Balikpapan dan Samarinda. Tol harus jadi sebelum ibu kota beroperasi karena

tol sekaligus akses dari ibu kota ke pelabuhan dan bandara.

Bagaimana dengan pemeliharaan lahan?

Di 180.000 ha lahan yang dialokasikan, tak ada HPH. Adanya hutan tanaman industri. Artinya pemilik lahan tetap pemerintah. Hanya ada satu (perusahaan dengan kepemilikan luas 40.000 ha). Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK) menegaskan, ada peraturan pemerintah yang memungkinkan pemerintah sewaktu-waktu meminta lahan tersebut. Semua izin konsesi di situ, tak akan diperpanjang. Yang bisa diambil, segera diambil. Izin usaha pertambangan juga tak ada. Kebanyakan tambang di sana sudah tak beroperasi.

Kajian lingkungannya?

Kita tidak ganggu hutan lindung. Kita akan konsepkan *forest city*. Tentang warga, kota itu inklusif. Siapa saja boleh masuk. Orang lokal bisa berpartisipasi.

Pemukiman warga yang ada di kawasan 180.000 ha?

Warga yang tinggal di daerah pantai tak banyak. Kan, kalau warga tak harus pindah. Mereka bisa menjadi bagian dari kawasan selama status tanahnya jelas.

Kedutaan asing?

Akan ada area khusus untuk kedutaan yang masuk di wilayah 40.000 ha. Pemerintah akan bantu sediakan tanah dengan skema menarik agar kedutaan dipindahkan. Mungkin gedung-gedung kedutaan yang baru-baru seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris tetap bisa menjadi kedutaan untuk ASEAN dan konsulat jenderal di Jakarta. Dubesnya ada di ibu kota baru. Sekretariat ASEAN tetap di Jakarta.

Bagaimana dengan pengaturan perizinan usaha?

Apakah BKPM atau Kementerian Investasi pasti harus punya kantor di Jakarta. Tapi ke depan, kita tak lagi mendorong perizinan *face to face*. Sekarang pemerintah sudah buat *on line single submission*. Ya, pakai itu saja sehingga, kan, tak harus kantornya di Jakarta. Jadi, perizinannya tak akan terganggu.

(FX LAKSANA AS/
NIKOLAUS HARBOWO)

Judul	Menjawab Kritik Pemindahan Ibukota	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman Jendela D)		
Resume	Sejumlah kritik bermunculan seiring dengan pengumuman lokasi baru ibukota Indonesia. Pemerintah pun sigap menjawab berbagai kritik terkait pemindahan ibukota tersebut.		



Suasana perbaikan ruas jalan di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019).

MENJAWAB KRITIK PEMINDAHAN IBU KOTA

Sejumlah kritik bermunculan seiring dengan pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah pun sigap menjawab berbagai kritik terkait pemindahan ibu kota tersebut.

Pendapat kritis muncul dari beragam pandangan, mulai dari ekonom senior yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang.

Untuk menanggapi segala kritik itu, *Kompas* bertemu langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Emil Salim

Terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, ekonom senior Emil Salim

berpendapat, pemerintah saat ini seharusnya tidak memprioritaskan pemindahan ibu kota negara dalam lima tahun ke depan.

Seharusnya pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Emil meyakini, dari sisi manfaat penggunaan anggaran, pembangunan SDM lebih berdampak ekonomi daripada pemindahan ibu kota (*Kompas*, 27/8/2019).

Menanggapi kritik tersebut, Bambang menjelaskan, meski pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN, tak akan mengotak-atik alokasi anggaran yang telah difokuskan terhadap pembangunan SDM selama lima tahun ke depan. Pemerintah akan mencari sumber pendapatan baru lewat kerja sama pengelolaan aset dengan

swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), baik di ibu kota baru, maupun di Jakarta.

"Jadi, nanti ada pemukiman dari situ yang kemudian langsung diarahkan untuk ikut membangun ibu kota baru. Intinya, sumber APBN murninya tak akan diganggu, tetapi kami tetap akan fokus pada SDM lima tahun ke depan. Kami sadar sekali, kok, mengenai pentingnya memanfaatkan bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi malah menjadi beban," kata Bambang.

Ridwan Kamil

Kritik juga datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski mendukung pemindahan ibu kota, Ridwan menilai desain pembangunan ibu kota baru terlalu boros lahan. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan lahan 180.000 hektar untuk 1,5 juta penduduk.

Menurut Ridwan Kamil, Indonesia harus belajar dari kesalahan Brasil memindahkan ibu kota ke Brasilia dari Rio de Janeiro, dan Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw.

Baik Brasilia maupun Naypyidaw, kini sepi aktivitas karena lahannya terlalu luas. Kondisi itu membuat warga tidak betah.

Bambang menanggapi kritik tersebut dengan memperlihatkan rencana pembangunan di ibu kota baru. Lahan seluas 180.000 hektar itu bukan seluruhnya untuk infrastruktur, melainkan 50 persennya akan dibuat ruang terbuka hijau. Sisanya sekitar 90.000 hektar.

Pemindahan di ibu kota baru juga tidak secara langsung 90.000 hektar, tetapi bertahap. Tahap pertama, dalam lima tahun, pembangunan akan difokuskan pada kantor-kantor pemerintahan dalam lahan seluas 6.000 hektar. Kemudian, pembangunan akan menyebar ke wilayah inti hingga seluas 40.000 hektar, seperti pembangunan pusat kegiatan bisnis, perguruan tinggi, dan *science technopark*.

Dengan demikian, pertumbuhan penduduk lebih bisa terkendali. Diprediksi, sekitar 1,5 juta penduduk itu baru akan tercapai dalam 5-10 tahun mendatang.

"Itu, kan, kami *mitigasi*-nya kota itu tak hanya sebentar. Pak Ridwan Kamil bilang *kegedean*. Kalau memang hanya ibu kota dalam pengertian konteks sekarang, ya, *kegedean*, tetapi, kan, kita bicara kota ke depan. Jadi, kami mencegah kota ini agar tak terlalu *crowded* atau *urban sprawl*," tutur Bambang.

Jatam
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mengkritik pemindahan ibu kota yang disebut hanya akan menguntungkan pemilik konsensi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim.

Berdasarkan catatan Jatam Kaltim, terdapat 1.190 izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Secara khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 625 IUP.

Tak hanya itu, berdasarkan catatan Jatam, mayoritas lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dikuasai oleh PT ITCI Kartika Utama. To-

kota baru juga tidak secara langsung 90.000 hektar, tetapi bertahap. Tahap pertama, dalam lima tahun, pembangunan akan difokuskan pada kantor-kantor pemerintahan dalam lahan seluas 6.000 hektar. Kemudian, pembangunan akan menyebar ke wilayah inti hingga seluas 40.000 hektar, seperti pembangunan pusat kegiatan bisnis, perguruan tinggi, dan *science technopark*.

Dengan demikian, pertumbuhan penduduk lebih bisa terkendali. Diprediksi, sekitar 1,5 juta penduduk itu baru akan tercapai dalam 5-10 tahun mendatang.

"Itu, kan, kami *mitigasi*-nya kota itu tak hanya sebentar. Pak Ridwan Kamil bilang *kegedean*. Kalau memang hanya ibu kota dalam pengertian konteks sekarang, ya, *kegedean*, tetapi, kan, kita bicara kota ke depan. Jadi, kami mencegah kota ini agar tak terlalu *crowded* atau *urban sprawl*," tutur Bambang.

Jatam

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mengkritik pemindahan ibu kota yang disebut hanya akan menguntungkan pemilik konsensi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim.

Berdasarkan catatan Jatam Kaltim, terdapat 1.190 izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Secara khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 625 IUP.

Tak hanya itu, berdasarkan catatan Jatam, mayoritas lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dikuasai oleh PT ITCI Kartika Utama. To-

tal lahan yang dikuasai 173.395 hektar yang membentang di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Hal ini diketahui dari SK IUPPHK-HA: 160/Menhut-II/2012, tertanggal 27 Maret 2012.

Menanggapi hal itu, Bambang mengakui bahwa lahan seluas 6.000 hektar di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang akan dibangun pusat pemerintah ibu kota baru, dimiliki oleh PT ITCI. Namun, dia menegaskan, kawasan itu termasuk dalam hutan tanaman industri (HTI). Dengan begitu, status kepemilikan lahan ada di tangan pemerintah.

"Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya) sudah menegaskan kepada saya bahwa ada peraturan pemerintah yang memungkinkan pemerintah setiap saat bilang 'saya butuh lahan ini,'" ujar Bambang.

Terkait kompensasi lahan yang sudah ditanami oleh PT ITCI, Bambang menyebut, kemungkinan akan diganti per pohon yang sudah ditanam. "Tentu pun biayanya enggak gede, enggak sampai miliaran," katanya.

Terkait IUP di ibu kota baru, Bambang mengatakan, semua proses perpanjangan izinnya akan distop. Dengan demikian, pembangunan tak terganggu oleh kepemilikan lahan atau bekas pertambangan.

Kemudian, lanjut Bambang, untuk lubang bekas tambang, pihaknya akan merehabilitasinya dengan penimbunan tanah atau menjadikannya sebagai danau.

(NIKOLAUS HARBOWO)

Judul	Kembangkan Jakarta Smart City, DKI Gandeng Usaha Rintisan	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 18)		
Resume	Konsep smart city di Jakarta berubah orientasi, dari awalnya memprioritaskan aplikasi pengaduan, kini tengah dikembangkan untuk mencakup seluruh aspek kehidupan warga melalui kolaborasi dengan pihak di luar pemerintahan.		

KOTA CERDAS

Kembangkan Jakarta Smart City, DKI Gandeng Usaha Rintisan

JAKARTA, KOMPAS — Konsep kota cerdas atau *smart city* di Jakarta berubah orientasi, dari awalnya memprioritaskan aplikasi pengaduan, kini tengah dikembangkan untuk mencakup seluruh aspek kehidupan warga melalui kolaborasi dengan pihak di luar pemerintahan. Saat ini, perubahan konsep itu tengah dalam pembangunan fondasi untuk segera diluncurkan.

Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jakarta Smart City Billy Akadia mengatakan, selama lima tahun terakhir, prioritas Jakarta Smart City masih sebatas penyediaan aplikasi pengaduan.

Adapun Jakarta Smart City dengan konsep baru berusaha mewujudkan enam pilar Jakarta Smart City. Keenamnya yaitu *smart mobility*, *smart living*, *smart economy*, *smart governance*, *smart people*, dan *smart environment*.

"Semua ini akan berusaha diwujudkan, tidak saja menyediakan aplikasi pengaduan," kata Billy di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Billy, mengharapkan konsep Jakarta sebagai *smart city* 4.0, yaitu lebih pada arah pemerintah kolaboratif, bukan sebagai fasilitator dan pemberi perintah saja. Untuk mewujudkan kolaborasi ini, Jakarta Smart City membuka pintu bagi semua usaha rintisan (*start up*) yang mempunyai ide mengembangkan Jakarta Smart City.

Saat ini, sejumlah hasil kolaborasi ini sudah terlihat seperti Gowes, yaitu peminjaman sepeda di Bundaran Hotel Indonesia, pembayaran pajak melalui pasar dalam jaringan (*daring*) atau *marketplace*, ataupun pengembangan peta petunjuk arah dalam bertransportasi umum Trafi.

Konsep smart city tak hanya cerdas, tetapi juga mendorong kota yang berkelanjutan.

Suryono Herlambang

Jakarta Smart City juga tengah menggagas platform Jakarta Kini (Jaki) yang mengintegrasikan seluruh situs dan aplikasi layanan publik Pemprov DKI Jakarta yang saat ini masih terpisah-pisah.

Selain itu, juga menata penduduk dengan memberi identitas pada warga Jakarta di dunia maya. Ke depan, teknologi ini bisa meringkaskan beragam proses pelayanan publik.

"Kalau mau daftar program pemerintah, DP 0 Rupiah, misalnya, bisa dilakukan *profiling*

lewat data yang sudah masuk," katanya.

Bentuk kerja sama yang dipersiapkan lainnya di antaranya aplikasi untuk pengendalian emisi dan teknologi pengenalan pelat nomor kendaraan yang terhubung dengan basis data perpajakan daerah. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan pajak karena selama ini masih ada yang wajib pajak yang menunggak meskipun sudah diperingatkan.

Menurut Billy, untuk mewujudkan *smart economy*, pihaknya juga bekerja sama dengan usaha rintisan yang saat ini sudah berstatus *unicorn*, bahkan *decacorn*. "Sehingga kita tidak jadi penonton saja," ujarnya.

Kanal pengaduan

Kendati ada perubahan konsep, Billy memastikan kanal aduan takkan ditutup. Bahkan, saat ini, sudah 12 kanal aduan untuk masyarakat dengan wak-

tu respons kurang dari dua jam. Jumlah pengaduan berkisar 300-500 aduan per hari.

Billy mengakui, penggunaan Qlue menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut dia, hal itu bukan indikasi kemunduran dari konsep *smart city* Jakarta. Sebab, selain 12 kanal itu, juga ada aduan langsung yang justru diminati masyarakat.

Peneliti dan pengajar di Departemen Perencanaan Kota dan Realestat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, mengatakan, konsep *smart city* tak hanya cerdas, tetapi juga mendorong kota yang berkelanjutan.

Konsep ini artinya kota yang inovatif dalam penggunaan teknologi informatika dalam meningkatkan kualitas hidup dan efektifitas pengelolaan perkotaan, dari sisi ekonomi, lingkungan, hingga sisi sosial.

(IRE)

Judul	Kaltim Siapkan Akses Dasar	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Pemindahan ibukota negara ke kaltim mulai disiapkan. Untuk tahap awal, yang akan digarap adalah akses dasar berupa infrastruktur dan persiapan daya dukung air bersih dan listrik.		

Kaltim Siapkan Akses Dasar

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur mulai disiapkan. Untuk tahap awal, yang akan digarap adalah akses dasar berupa infrastruktur dan persiapan daya dukung air bersih dan listrik.

KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS — Persiapan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur dirancang dalam beberapa tahap. Tahap awal di antaranya pembangunan akses dasar, seperti jalan, serta memastikan kecukupan daya dukung air bersih dan listrik.

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan jadwal pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jalan, bendungan, dan waduk dijadwalkan selesai pertengahan tahun 2023.

"Untuk memenuhi kebutuhan air, perlu dibuat lima bendungan lagi. Ada yang sedang dibangun, ada yang baru dibahas," kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Anang

Muchlis di Samarinda, Selasa (27/9/2019). Pemindahan ibu kota akan memindahkan lebih dari 1 juta aparat sipil negara.

Pembangunan Bendungan Sepaku-Semai di Penajam Paser Utara (PPU) sedang berlangsung dengan target selesai tahun 2023. Bendungan Samboja 2 dan Bendungan ITCHI dalam proses studi kelayakan.

Kecamatan Sepaku di PPU dan Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara merupakan dua daerah yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara yang baru. Istana negara, kantor kementerian, gedung DPR, dan lembaga yudikatif akan dibangun di satu dari dua kecamatan itu.

Di Yogyakarta, Menteri

PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan raya dan drainase jadi infrastruktur pertama yang akan dibangun di Kaltim. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang mampu mendorong pembangunan infrastruktur lain di kawasan tersebut.

"Target kami, jalan itu (dibangun) pertengahan 2020," ujar Basuki se usai mengisi kuliah umum di depan puluhan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM.

Hutan dipertahankan

Selanjutnya, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan juga bakal dijamin dalam pembangunan di sana. Itu mendasari konsep hutan kota. Bahkan, rehabilitasi Bukit Soeharto

juga akan dilakukan.

"Kami akan merehabilitasi (Bukit Soeharto) dan dijadikan hutan kembali. Kami juga akan membuat embung-embung untuk 'ruang biru'. Keberadaan hutan di Kalimantan akan kami pertahankan," kata Basuki.

Lahan yang disiapkan untuk ibu kota negara yang baru itu seluas 180.000 hektar. Kebutuhan lahan untuk kantor kementerian dan lembaga negara berkisar 4.000-6.000 ha. Area inti yang akan dibangun tahap pertama seluas 4.000 ha.

Guru Besar Arsitektur UGM Wiendu Nuryanti menyampaikan, konsep hijau untuk sebuah ibu kota negara penting sehingga hutan patut dipertahankan. Tidak cukup hutan dipertahan-

kan, tetapi hutan yang rusak juga perlu direvitalisasi.

Hal lain yang harus jadi sorotan adalah bagaimana ibu kota baru itu nantinya tidak ketinggalan zaman. Sejak awal, kenyamanan dan keindahan tata ruang harus dipikirkan matang.

Terkait itu, Basuki menyatakan, akan ada Jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang bakal menambah ibu kota kian menarik. "Makanya, kami buat dekat Samarinda dan Balikpapan supaya lebih hidup," ujarnya.

Terkait desain istana negara, Basuki mengatakan, hal itu belum ditentukan. Namun, secara garis besar, desainnya mengambil tema nasional. Saat ini masih dilakukan pembahasan.

(CIP/BRO/IDO/NCA)

Judul	Sektor Jasa Jadi Motor Pertumbuhan Ibukota	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 3)		
Resume	Bappenas menargetkan pemindahan ibukota bisa menumbuhkan berbagai sektor ekonomi di Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur.		

Sektor Jasa Jadi Motor Pertumbuhan Ibu Kota Baru

Mampu memicu pertumbuhan ekonomi 0,1-0,2 persen.

EDISI, 28 AGUSTUS 2019

JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan pemindahan ibu kota bisa menumbuhkan berbagai sektor ekonomi di Kalimantan dan kawasan Indonesia timur. Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soepriyadi Prawiradinata, mengatakan sektor jasa menjadi tumpuan ekonomi di pusat pemerintahan baru.

"Kami sudah petakan dari semua sektor pembentuk produk domestik regional bruto, services atau bidang jasa akan bergerak signifikan," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Merujuk ke kajian Bappenas, kata Rudy, sektor jasa mencakup pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jasa umum. Jenis layanan lainnya diperkirakan baru bertumbuh setelah rampungnya struktur utama ibu kota baru. "Setelah proses konstruksi besar, mulai ada supply- demand. Semua sektor mulai tumbuh," ujarnya.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya ke lokasi yang beririsan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain karena risiko bencana minim, wilayah tersebut dianggap strategis dengan kota berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Rudy memastikan lembaganya sudah meneliti pemekaran dampak ekonomi dari lokasi ibu kota baru. "Ada asumsi dan variabel. Kami tentukan wilayah yang paling membawa dampak besar untuk pertumbuhan di sekitarnya dan untuk nasional," tutur dia.

Dalam kajian Bappenas, perpindahan ibu kota mampu memicu pertumbuhan perekonomian hingga 0,1-0,2 persen, salah satunya karena dorongan investasi baru.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengharapkan kesempatan yang lebih luas untuk usaha kreatif di Jakarta, dengan memanfaatkan kantor pemerintah yang ditinggalkan. "Ibu kota baru juga bisa untuk pengembangan ekonomi kreatif, yaitu arsitektur, untuk interior design pada awal pembangunannya."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menargetkan eksekusi infrastruktur dasar ibu kota baru bisa dimulai pada pertengahan tahun depan. Hingga saat itu tiba, kata dia, pemerintah merancang kawasan dan tata ruang kota, serta prasarana penunjang, seperti jalan, prasarana

air, dan sanitasi. "Kami rancang sekarang sampai saatnya groundbreaking," ucapnya.

Pemerintah mengklaim sudah menguasai lahan seluas 180 ribu hektare di Kalimantan Timur. Pengembangan ibu kota diawali di atas lahan seluas 40 ribu hektare. Dari kawasan seluas itu, lahan 6.000 hektare dipakai untuk pusat pemerintahan.

Basuki memperkirakan pemindahan ibu kota memakan waktu empat tahun. Anggaran negara diproyeksikan memenuhi 19 persen dari total kebutuhan biaya Rp 466 triliun. Sisanya berasal dari kemitraan dan investasi swasta secara langsung. "Anggaran negara yang dipakai juga multiyear atau tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun berjalan," ucapnya.

Adapun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, mengatakan pemindahan ibu kota tak membawa dampak positif. Hal itu didasari riset simulasi Indef yang menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau model CGE (computable general equilibrium).

Salah satu hasilnya memproyeksikan lonjakan harga barang akibat naiknya jumlah penduduk di Kalimantan dan angka permintaan. "Jika suplai terbatas, harga otomatis naik. Kalau terjadi secara bersamaan, maka akan inflasi," katanya.

Judul	DPR Tuntut Percepatan Aturan Ibukota Baru	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 4)		
Resume	Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPR Melchias Markus Mekeng, mengatakan pemerintah harus mempercepat penyusunan regulasi untuk pemindahan ibukota.		

DPR Tuntut Percepatan Aturan Ibu Kota Baru

Dua kementerian menyiapkan pendanaan mulai tahun ini.

EDISI, 28 AGUSTUS 2019

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat, Melchias Markus Mekeng, mengatakan pemerintah harus mempercepat penyusunan regulasi untuk pemindahan ibu kota. Regulasi yang dia maksudkan ialah rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru. "Kalau tidak ada, tidak akan bisa. Anggaran pun tidak bisa keluar," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Mekeng mengatakan pembahasan RUU ini harus cepat agar rencana pemindahan ibu kota yang ditargetkan selesai pada 2024 berjalan tepat waktu. Menurut dia, dukungan politik atas rencana Presiden Joko Widodo, yang disampaikan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jumat dua pekan lalu, sudah cukup besar. "Tapi memang banyak yang harus dibahas, seperti rencana terinci dari pemerintah," ujar dia.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan setidaknya ada sembilan undang-undang yang harus dibahas untuk pemindahan ibu kota. Tak hanya membikin aturan baru, beberapa undang-undang yang sudah ada perlu direvisi agar tidak tumpang-tindih.

Menurut Yandri, undang-undang baru bisa menggantikan aturan lama yang menyebut Jakarta sebagai ibu kota negara. Adapun revisi undang-undang yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tata ruang daerah hingga penanggulangan bencana. Dua hal itu sudah diatur dalam aturan tentang kebencanaan serta agraria dan tata ruang. "Ini kan bukan bedol desa, tapi memindahkan pusat pemerintahan," ujar dia.

Senin lalu, Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yaitu di perbatasan Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rancangan pemerintah, pemindahan ibu kota membutuhkan dana Rp 466 triliun. Anggaran itu untuk membangun pusat pemerintahan di kawasan seluas 180 ribu hektare.

Dalam rapat paripurna yang digelar kemarin, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan Jokowi sudah menyampaikan kajian pemindahan ibu kota yang komprehensif kepada pimpinan legislatif. "Nanti surat ini kami sampaikan ke komisi-komisi, sesuai dengan aturan," ujar Bambang. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan mengaku sudah membaca kajian tersebut. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, naskah rencana pembangunan setebal lebih dari 150 halaman itu terlampau mewah. "Seperti proposal pengembang saja. Harusnya kan dibahas dari aspek sejarah. Undang sejarawan dan kerabat founding fathers kita," ujar Fahri.

Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi NasDem, Jhonny Plate, menilai niat pemerintah mengalokasikan dana Rp 90 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau "hanya" 20 persen dari total kebutuhan pendanaan pemindahan ibu kota, sudah cukup bagus. "APBN cuma sedikit, sisanya swasta," kata dia. "Perlu dukungan politik yang besar agar pembahasan RUU bisa lancar."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, sudah mengalokasikan beberapa pos belanja untuk pembangunan calon ibu kota baru. Namun Sri mengatakan angkanya belum bisa dipastikan. "Masterplan dan landasan hukumnya belum dijelaskan. Jadi, kami belum memutuskan bagaimana nilai pendanaan, termasuk memikirkan aset-aset," ujar Sri Mulyani.

Judul	Ibukota pindah, Anies ingin bekas kompleks kementerian dan lembaga menjadi ruang hijau	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Metro 1)		
Resume	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengincar bekas kompleks kantor kementerian dan lembaga bila ibukota negara jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur.		

Ibu kota pindah, Anies ingin bekas kompleks kementerian dan lembaga menjadi ruang hijau.

Gedung bertingkat di sepanjang Jalan Thamrin dan Jenderal Sudirman, Jakarta.

EDISI, 28 AGUSTUS 2019

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengincar bekas kompleks kantor kementerian dan lembaga bila ibu kota negara jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bekas kompleks kantor

pemerintah pusat itu bisa dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. "Tetap difungsikan sebagai kantor agar perekonomian terus bergerak. Namun ada tambahan RTH," kata Anies di Balai Kota, kemarin.

Di samping untuk pengembangan ruang terbuka hijau, menurut Anies, gedung dan aset pemerintah pusat di Jakarta bisa dijadikan destinasi wisata sejarah. Dengan begitu, Anies yakin Kota Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan wisata. "Jakarta tetap akan jadi kota padat dan sibuk di Indonesia," ujarnya.

Masa depan status aset pemerintah pusat menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemanfaatan kantor kementerian, lembaga negara, hingga kedutaan besar di Jakarta bakal tidak optimal bila sebagian pegawainya juga diboyong ke Kalimantan Timur.

Penjabat sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Syarif, mengatakan pemerintah pusat seharusnya menghibahkan sejumlah asetnya ke pemerintah Jakarta. Alasannya, demi kepastian perawatan dan kelangsungan pemanfaatan aset tersebut.

Syarif juga menyarankan peleburan beberapa lembaga negara yang selama ini turut menangani permasalahan di Jakarta sebagai ibu kota. Salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mengelola 13 sungai di Ibu Kota. "Karena sudah bukan ibu kota, Jakarta punya hak otonom. Jadi, semua bisa dilebur dan diberikan ke Jakarta," ucap Syarif.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menuturkan semua aset tanah dan gedung pemerintah pusat di Jakarta berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Menurut dia, hanya Istana Negara dan Kantor Wakil Presiden yang tak akan mengalami perubahan status. Sedangkan gedung lainnya direncanakan beralih fungsi melalui pelbagai skema, antara lain penjualan.

Menurut Basoeki, hasil penjualan sejumlah gedung dan aset pemerintah di Jakarta akan menjadi sumber pembiayaan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Pemerintah hanya akan memakai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai 19,2 persen dari total biaya pemindahan ibu kota senilai Rp 460 triliun. "Lainnya dari investasi dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," tutur Basoeki.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belum ada keputusan tentang aset-aset pemerintah pusat di Jakarta. Menurut dia, saat ini kementeriaannya tengah menyempurnakan inventarisasi semua aset pemerintah pusat. Kementerian Keuangan juga masih menunggu rencana induk (master plan) pembangunan dan proses pemindahan ibu kota negara.

Rencana induk tersebut, menurut Sri Mulyani, akan menjadi dasar penghitungan alokasi anggaran pemindahan. "Nanti kami kaji secara matang. Seminin mungkin kemungkinan pembiayaan (dari APBN)," kata dia.

Judul	Ibukota Baru Berkonsep A City in The Forest	Tanggal	Rabu, 28 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 3)		
Resume	Menteri PUPR mengatakan ibukota negara yang akan dibangun untuk menggantikan Jakarta akan dibentuk sebagai kota cerdas dan modern berstandar internasional.		

PEMERINTAHAN

Ibu Kota Baru Berkonsep A City in The Forest

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ibu kota negara yang akan dibangun untuk menggantikan Jakarta akan dibentuk sebagai kota cerdas dan modern berstandar internasional.

Selain itu, menjadi ikon *urban design* sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.

Ia menjamin proses pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur tidak merusak lingkungan. Bahkan pihaknya akan menghijaukan kembali daerah bekas sawit dan batu bara yang ada di sekitarnya.

"Konsepnya *a city in the forest*, hutan

Soeharto banyak bekas *illegal logging* akan dihentikan lagi," ujar Basuki di UGM, Yogyakarta, kemarin.

Presiden Joko Widodo secara resmi memilih Kaltim sebagai ibu kota baru Indonesia, Senin (26/8), yang meliputi sebagian daerah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menurut rencana, kata Basuki, pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2024. Pada 2020, kata dia, pihaknya menyiapkan desain kawasan serta konsep tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan



Basuki Hadimuljono
Menteri PU-Pera

MU SUSANTO

aparatur sipil negara muda di instansi pemerintah pusat wajib pindah ke ibu kota pemerintahan baru di Kaltim. "Periode perekrutan 2017, 2018, dan sekarang 2019, yang siap mental, berwawasan cukup bagus, kemampuan berpikir profesional cukup bagus, itu yang akan pindah," ujarnya, kemarin.

Syafruddin menyebutkan jumlah ASN di instansi pemerintah pusat sekitar 180 ribu orang. Sebanyak 30%

di antara mereka mungkin tidak wajib pindah karena menjelang masa pensiun. Artinya, Kemenpan-Rebiro memperkirakan ada 126 ribu ASN di instansi pusat yang harus pindah ke ibu kota baru di Kaltim.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemindahan ibu kota masih memerlukan proses panjang. "Masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai dengan DPR. Perlu pendalaman dari semua sektor dan kajian akademis. Dari situ baru RUU (rancangan undang-undang), nanti dibahas di DPR," ujar JK, kemarin.

JK pun memperkirakan pembahasan RUU ibu kota dan RUU terkait lainnya baru akan dikerjakan anggota DPR periode 2019-2024.

"Kalau DPR sekarang kan tinggal sisa sebulan lebih tugasnya, jadi mungkin dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya. DPR juga belum terbentuk, mengatur komisinya, itu makan tempo juga itu, *deal deal*-nya," ujarnya. (Pra/Dro/AU/AT/X-4)